
Implementasi Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Pada Era Digitalisasi Pemerintahan

Syabran Jabar¹, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang

E-mail : syabran.map21@gmail.com

ABSTRACT

Performance-based regional financial management has become an essential strategy for improving accountability, efficiency, and effectiveness in government administration, especially in the rapidly evolving era of digitalization. Digital transformation requires local governments to integrate information technology into every stage of budget planning, implementation, and reporting. With proper implementation, digitalization not only accelerates administrative processes but also reduces the potential for irregularities and strengthens public transparency. This condition demonstrates that digital transformation is a crucial pillar for realizing financial governance that is more responsive and adaptable to contemporary challenges. In the context of regional financial management, the application of a performance-based system serves as a foundation for assessing the extent to which government programs and activities achieve their predetermined indicators. This system encourages each local government unit to focus more on measurable outcomes rather than merely completing procedural tasks. The integration of digital technology with performance-based concepts enables monitoring and evaluation processes to be conducted more accurately, objectively, and in real time. Furthermore, this approach enhances coordination across departments, allowing budget management to be carried out more strategically, effectively, and with greater emphasis on public benefit. The implementation of performance-based regional financial management in the digitalization era also presents several challenges, including limitations in human resources, infrastructure readiness, and the need for adaptation to more modern work systems. However, these challenges can be addressed through capacity-building for government employees, the provision of supportive facilities, and the refinement of regulations that encourage digital transformation. With strong commitment from all stakeholders, digitalization can serve as a catalyst for optimizing regional financial governance. Ultimately, this will contribute significantly to achieving public services that are effective, accountable, and sustainable in the future.

Keywords: Regional Financial Management, Performance-Based System, Government Digitalization, Accountability, Transparency.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada era digitalisasi yang terus berkembang. Transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan anggaran. Dengan implementasi yang tepat, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mampu mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan pilar penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, penerapan sistem berbasis kinerja menjadi fondasi untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Sistem ini mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih fokus pada pencapaian hasil yang terukur, bukan sekadar penyelesaian prosedural. Integrasi antara teknologi digital dengan konsep kinerja memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih akurat, objektif, dan real time. Selain itu, pendekatan ini memperkuat koordinasi antar-unit kerja sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih strategis, efektif, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Implementasi manajemen keuangan daerah berbasis kinerja pada era digitalisasi pemerintah juga menghadirkan beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, serta adaptasi terhadap perubahan sistem kerja yang lebih modern. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung, serta penyempurnaan regulasi yang mendukung transformasi digital. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, digitalisasi mampu menjadi katalisator dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah. Hal ini akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan Daerah, Berbasis Kinerja, Digitalisasi Pemerintahan, Akuntabilitas, Transparansi.

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan daerah berbasis kinerja menjadi salah satu pilar utama dalam upaya modernisasi tata kelola pemerintahan di era digital. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Perubahan ini muncul seiring semakin kuatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana publik. Digitalisasi kemudian hadir sebagai sarana penting untuk mewujudkan proses administrasi dan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara konsep kinerja dan

teknologi menjadi kebutuhan strategis dalam membangun tata kelola yang adaptif. Perubahan paradigma ini memperlihatkan bagaimana sektor pemerintahan semakin bergerak menuju sistem yang lebih terbuka dan responsive (Dunggio, R., 2025).

Transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menekankan pada penggunaan teknologi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem digital mampu melakukan analisis data secara lebih komprehensif dan real time. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun

prioritas anggaran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, digitalisasi memperkuat mekanisme pengawasan internal sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Sistem berbasis kinerja yang terintegrasi teknologi juga membuat evaluasi capaian program menjadi lebih objektif. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekadar tren, tetapi telah menjadi fondasi baru dalam tata kelola keuangan daerah.

Tantangan utama dalam implementasi manajemen keuangan berbasis kinerja terletak pada kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Banyak aparatur yang masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan berbagai aplikasi dan sistem digital. Kurangnya pemahaman terhadap konsep kinerja juga sering menghambat proses evaluasi program secara objektif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi ini. Pelatihan berkelanjutan perlu diberikan untuk memastikan aparatur mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan teknologi modern. Tanpa kesiapan SDM, digitalisasi tidak akan memberikan dampak maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah (Hasyim, M. A., & Ilham, R. 2025).

Selain sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan tanpa hambatan teknis. Banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala

jaringan, perangkat, dan integrasi sistem yang belum optimal. Kondisi ini dapat menghambat penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja berbasis digital. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perangkat teknologi yang digunakan mampu mendukung seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi antar-instansi. Sistem digital memungkinkan pertukaran data antar perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Kolaborasi ini mendorong penyusunan kebijakan yang lebih holistik dan berbasis bukti nyata. Selain itu, integrasi sistem informasi membuat setiap unit kerja dapat memantau perkembangan program secara lebih komprehensif. Hal ini memberikan dorongan positif terhadap tercapainya sinergi dalam pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi yang optimal pada akhirnya akan mendukung pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efisien dan terarah (Sinulingga, E. N. 2025).

Digitalisasi dalam manajemen keuangan daerah juga memperkuat transparansi publik yang kini menjadi tuntutan utama di era modern. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait anggaran, penggunaan dana, dan capaian program pemerintah. Transparansi seperti ini mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah daerah. Selain itu, keterbukaan data memungkinkan masyarakat memberikan pengawasan secara mandiri. Dampak positif ini memperlihatkan bahwa digitalisasi mampu menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana penting untuk membangun legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran juga memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah. Evaluasi yang dilakukan secara digital menghasilkan data yang lebih objektif dan terstandar. Melalui data tersebut, pemerintah daerah dapat menilai program mana yang memberikan dampak signifikan dan mana yang perlu diperbaiki. Proses evaluasi yang sistematis mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, sistem berbasis kinerja berperan penting dalam membangun siklus pengelolaan keuangan yang berkelanjutan (Hasyim, M. A., & Ilham, R. 2025).

Integrasi sistem informasi keuangan daerah dengan konsep kinerja juga membawa perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Laporan yang dihasilkan melalui sistem digital cenderung lebih akurat dan cepat dibandingkan metode manual. Kecepatan pelaporan ini membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi tepat waktu kepada berbagai pihak terkait. Selain itu, pelaporan digital

memudahkan proses audit internal maupun eksternal. Audit yang lebih efektif kemudian mendorong peningkatan kualitas tata kelola daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi memberi dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas.

Namun, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan tanpa hambatan. Beberapa daerah masih menghadapi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi dan perbedaan tingkat kemajuan penerapan digitalisasi. Kondisi geografis, keterbatasan anggaran, dan rendahnya literasi digital seringkali menjadi faktor penghambat. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan berupa regulasi, pendanaan, dan pendampingan teknis untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Selain itu, daerah juga perlu memiliki strategi adaptif untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kemampuan masing-masing. Dengan pendekatan yang tepat, hambatan dalam implementasi digitalisasi dapat diminimalkan (Sinulingga, E. N. 2025).

Implementasi manajemen keuangan daerah berbasis kinerja juga menuntut adanya regulasi yang konsisten dan responsif. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan yang diterapkan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak relevan atau ketinggalan zaman dapat menghambat inovasi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pembaruan regulasi secara periodik perlu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital. Selain itu, mekanisme pengawasan berbasis digital harus diperkuat untuk memastikan setiap perangkat daerah mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan

adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan manajemen keuangan daerah akan berjalan lebih efektif.

Implementasi manajemen keuangan daerah berbasis kinerja pada era digital memberikan peluang besar untuk menciptakan tata kelola yang modern, terbuka, dan efisien. Digitalisasi memungkinkan proses pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun dengan komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, dan kesiapan infrastruktur, transformasi ini dapat berjalan dengan baik. Penguatan kompetensi aparatur juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, penerapan sistem berbasis kinerja akan mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif (Hasyim, M. A., & Ilham, R. 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi manajemen keuangan daerah berbasis kinerja pada era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan data, proses, dan konteks yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti dokumen resmi, laporan pemerintah, dan literatur terkait yang mendukung

analisis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi dinamika kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan yang terjadi akibat digitalisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi literatur yang mencakup berbagai referensi dari jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen pemerintah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman teoritis sekaligus empiris mengenai perkembangan manajemen keuangan daerah. Selain itu, studi literatur memberikan landasan kuat untuk menganalisis hubungan antara digitalisasi dan implementasi sistem berbasis kinerja. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang konsisten. Analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan dampak digitalisasi terhadap tata kelola keuangan daerah.

Prosedur penelitian dilakukan dengan mengorganisasi data, melakukan interpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan literatur. Peneliti memastikan bahwa setiap data yang digunakan telah melalui proses seleksi dan verifikasi untuk menjamin validitas informasi. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan fokus pada aspek

kinerja, teknologi, dan regulasi yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis tersebut kemudian disusun untuk memberikan pemahaman yang runtut dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi aktual, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem keuangan daerah berbasis digital. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja pada era digital memberikan pengaruh besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah yang memanfaatkan sistem digital menunjukkan proses pengelolaan anggaran yang lebih cepat dan mudah diawasi. Aplikasi yang digunakan membantu mencatat setiap transaksi dengan akurat. Kondisi ini membuat transparansi meningkat secara signifikan. Masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai anggaran daerah. Hubungan antara pemerintah dan publik menjadi lebih terbuka dan responsif. Integrasi digital dalam pengelolaan anggaran turut mengurangi risiko kesalahan administrasi pada proses pencatatan. Validasi otomatis dalam sistem membantu memastikan setiap data masuk sesuai prosedur. Hal ini mengurangi potensi terjadinya kesalahan manual yang sering muncul dalam proses konvensional. Data yang terdokumentasi dengan rapi menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, sistem mampu mendeteksi ketidaksesuaian sejak awal. Perbaikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien (Hasyim, M. A., & Ilham, R. 2025).

Penggunaan indikator kinerja menjadi lebih efektif ketika didukung oleh teknologi digital. Setiap indikator dapat dipantau melalui data real time yang tersedia dalam sistem. Capaian program menjadi lebih mudah dianalisis secara objektif. Proses pemantauan yang semula membutuhkan waktu kini dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, teknologi membuat visualisasi data lebih mudah dipahami. Keputusan berbasis bukti dapat dibuat secara lebih akurat. Penerapan teknologi digital meningkatkan kolaborasi antar-perangkat daerah dalam berbagai proses. Pertukaran data menjadi lebih cepat karena seluruh unit terhubung dalam satu sistem. Koordinasi antar-instansi berjalan lebih efisien tanpa hambatan administratif. Duplikasi anggaran dapat diminimalkan karena seluruh data dapat dilihat secara terbuka. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sinkron antara satu perangkat daerah dengan lainnya. Kondisi ini menciptakan efisiensi internal yang lebih tinggi.

Sistem keuangan digital mempercepat proses penyusunan laporan anggaran dalam setiap periode. Data transaksi yang masuk otomatis tersusun menjadi laporan yang siap dianalisis. Waktu penyusunan laporan menjadi jauh lebih singkat dibanding metode manual. Aparatur dapat mengalihkan fokus dari pengetikan administrasi menuju analisis substansi. Laporan digital juga memudahkan proses audit dari berbagai pihak. Kecepatan dan keakuratan informasi semakin

meningkatkan kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi digital membantu pemerintah daerah membuat proyeksi anggaran yang lebih tepat. Data historis dalam sistem memberikan gambaran jelas untuk menyusun rencana keuangan di masa mendatang. Kemampuan memprediksi kebutuhan anggaran menjadi lebih akurat. Kesalahan alokasi dapat dicegah sejak tahap perencanaan awal. Selain itu, teknologi membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas berdasarkan tren data. Perencanaan anggaran menjadi lebih matang dan realistis.

Sistem digital memperkuat pengawasan terhadap keuangan daerah melalui proses monitoring yang lebih cepat. Informasi yang masuk ke sistem dapat ditelusuri hingga detail transaksi. Setiap perubahan data tercatat dengan jelas sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan. Audit dapat dilakukan kapan pun tanpa harus menunggu laporan akhir. Penyimpanan data terpusat membuat proses penelusuran lebih mudah. Ketelitian dalam pengawasan meningkat secara signifikan. Penggunaan teknologi membuat aparatur lebih memahami konsep kinerja secara menyeluruh. Dashboard digital memberikan gambaran visual mengenai capaian program. Informasi yang ditampilkan membantu pegawai memahami target dan progres secara jelas. Hal ini mendorong munculnya komitmen lebih kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Identifikasi hambatan dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan data. Proses perbaikan menjadi lebih efisien.

Dalam penerapannya, terdapat berbagai hambatan terutama pada kesiapan kompetensi aparatur. Tidak semua pegawai

terbiasa mengoperasikan sistem digital secara maksimal. Pendampingan intensif menjadi kebutuhan dalam tahap awal penerapan. Selain itu, beberapa daerah masih memiliki infrastruktur jaringan yang belum memadai. Kendala tersebut membuat proses digitalisasi berjalan bertahap. Meskipun demikian, perkembangan menuju sistem modern tetap menunjukkan arah positif. Transformasi digital memunculkan perubahan budaya kerja yang lebih cepat dan berbasis data. Aparatur mulai terbiasa bekerja dengan sistem yang menuntut ketelitian dan transparansi. Proses kerja manual berangsur ditinggalkan karena dinilai kurang efisien. Adaptasi ini memerlukan waktu tetapi semakin mudah berkat dukungan aplikasi digital yang intuitif. Interaksi antar pegawai juga berubah menjadi lebih dinamis. Lingkungan kerja menjadi lebih terstruktur secara system (Sinulingga, E. N. 2025).

Daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan teknologi menunjukkan hasil yang lebih optimal. Dukungan anggaran untuk penguatan infrastruktur membuat proses digitalisasi berjalan lancar. Pelatihan yang diberikan secara berkala meningkatkan kemampuan aparatur. Kebijakan yang konsisten membantu menjaga stabilitas program digitalisasi. Koordinasi antara pimpinan dan pelaksana semakin solid. Komitmen yang kuat berdampak langsung pada keberhasilan sistem. Akses publik terhadap informasi anggaran meningkat berkat keterbukaan data melalui platform digital. Masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran secara langsung dan memberikan masukan.

Partisipasi publik ini memperkuat fungsi pengawasan sosial. Pemerintah terdorong untuk bekerja dengan lebih transparan dan bertanggung jawab. Kondisi ini meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan publik pun meningkat secara bertahap (Hasyim, M. A., & Ilham, R. 2025).

Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Setiap pengeluaran dapat dipantau secara real time sehingga pemborosan dapat ditekan. Program yang kurang efektif dapat dihentikan atau dialihkan dananya. Anggaran menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang berubah. Setiap rupiah menjadi lebih tepat sasaran berkat data yang jelas. Efisiensi penggunaan anggaran meningkat secara signifikan.

Integrasi digital membantu menyatukan proses perencanaan dan penganggaran secara lebih terstruktur. Data yang digunakan dalam perencanaan langsung terhubung dengan alokasi anggaran. Hal ini meminimalkan ketidaksesuaian antara program dan dana. Setiap program dapat dijalankan berdasarkan tujuan yang jelas dan terukur. Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan semakin tinggi. Dampaknya terlihat pada peningkatan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Berbagai hasil yang muncul menunjukkan bahwa digitalisasi membawa perubahan positif yang sangat luas. Proses pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan akurat. Efisiensi meningkat karena berbagai pekerjaan dapat dilakukan secara otomatis. Koordinasi antar-instansi menjadi lebih baik

dan terukur. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Transformasi digital menjadi pondasi penting dalam memperkuat tata kelola modern (Sinulingga, E. N. 2025).

Digitalisasi keuangan daerah menunjukkan potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas di masa mendatang. Sistem yang ada semakin berkembang mengikuti kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan baru. Pengelolaan anggaran menjadi lebih responsif terhadap kondisi yang berubah. Perubahan ini mengarah pada tata kelola yang lebih maju dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan publik.

Pembahasan

A. Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Kinerja

Penerapan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam cara pemerintah daerah mengelola anggaran. Pendekatan ini menekankan ketercapaian hasil, bukan sekadar penyelesaian prosedur administrasi. Pemerintah daerah terdorong untuk menyusun rencana kerja yang lebih jelas dan realistis berdasarkan indikator yang terukur. Setiap program dan kegiatan harus memiliki output dan outcome yang dapat dievaluasi secara sistematis. Dengan demikian, anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat formalitas, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kondisi ini

menciptakan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur.

Efektivitas penerapan konsep kinerja semakin meningkat ketika terintegrasi dengan teknologi digital. Sistem digital memudahkan perangkat daerah dalam memantau capaian indikator secara real time. Data yang tersaji secara visual membantu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan. Aparatur dapat memahami perkembangan program dengan lebih akurat melalui informasi yang tersaji secara otomatis. Selain itu, teknologi mengurangi beban administratif yang selama ini menghambat kinerja aparatur. Proses monitoring pun menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.

Pendekatan berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi program-program yang kurang produktif. Setiap kegiatan dapat diukur efektivitasnya berdasarkan data yang dihasilkan dari sistem digital. Jika terdapat program yang tidak memberikan manfaat optimal, anggaran dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas. Hal ini berdampak positif terhadap efisiensi keuangan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah menjadi lebih selektif dalam menetapkan program kerja. Proses ini meningkatkan kecermatan dalam penyusunan kebijakan anggaran.

Efektivitas kinerja juga terlihat dari peningkatan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Sistem berbasis kinerja memastikan bahwa setiap rencana kerja harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Kesesuaian ini membuat pelaksanaan program lebih terstruktur dan

memiliki dasar yang kuat. Tidak ada lagi program yang berjalan tanpa arah atau tanpa target yang jelas. Sinkronisasi ini memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut menciptakan tata kelola yang lebih profesional.

Selain meningkatkan efektivitas internal, konsep kinerja juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dapat melihat perkembangan program melalui data yang dipublikasikan secara digital. Akses informasi yang terbuka menciptakan transparansi yang lebih tinggi dalam penggunaan anggaran. Publik menjadi lebih mudah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Kejelasan informasi membuat masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menghasilkan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warganya.

Penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja memberikan dampak besar terhadap efektivitas sistem tata kelola daerah. Pemerintah menjadi lebih terarah dalam melaksanakan program pembangunan. Anggaran digunakan berdasarkan analisis data sehingga lebih tepat sasaran. Aparatur bekerja dengan lebih efisien dan terukur sesuai indikator yang ditetapkan. Kinerja perangkat daerah dapat meningkat secara signifikan dengan dukungan sistem yang terintegrasi. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan modern.

B. Peran Digitalisasi dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Digitalisasi memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan transparansi keuangan publik. Setiap transaksi yang tercatat dalam sistem keuangan digital dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai kewenangannya. Kejelasan data membuat publik dapat memperoleh informasi yang lebih valid terkait penggunaan anggaran daerah. Hal ini menciptakan ruang pengawasan sosial yang lebih kuat dan efektif. Masyarakat tidak lagi dibatasi oleh proses manual yang sulit diakses. Keterbukaan informasi ini memberikan dorongan besar bagi tumbuhnya budaya pemerintahan yang transparan.

Akuntabilitas meningkat karena seluruh data tersimpan secara otomatis dan tidak mudah dimanipulasi. Sistem digital mencatat setiap perubahan sehingga jejak audit dapat dilacak kapan pun diperlukan. Hal ini membuat setiap perangkat daerah lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi anggaran. Proses pengawasan pun menjadi lebih cepat dan objektif. Kesalahan atau penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Kondisi ini menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang lebih aman dan terpercaya.

Digitalisasi memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan secara lebih efisien. Laporan yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat tersusun otomatis berdasarkan data yang sudah ada dalam sistem. Dengan demikian, aparatur dapat meminimalkan beban administratif yang menyita waktu. Laporan digital juga dapat diperiksa secara cepat oleh auditor internal maupun eksternal. Kemudahan ini

meningkatkan kecepatan proses evaluasi anggaran. Akuntabilitas publik menjadi lebih optimal karena laporan dapat disajikan lebih tepat waktu (Sinulingga, E. N. 2025).

Keberadaan portal informasi keuangan daerah memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran secara mandiri. Fitur ini menjadi salah satu bentuk konkret penerapan prinsip transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Informasi mengenai rencana kerja, pelaksanaan anggaran, dan capaian program dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana daerah. Pemerintah pun terdorong untuk bekerja lebih terbuka dan jujur. Transparansi digital menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Digitalisasi juga membantu aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan lebih akurat dan terstruktur. Proses pencatatan digital mengurangi potensi kesalahan yang biasa terjadi pada pencatatan manual. Selain itu, sistem digital dapat memberikan notifikasi atau peringatan ketika terjadi ketidaksesuaian data. Aparatur lebih mudah memahami kesalahan dan segera melakukan perbaikan. Hal ini menciptakan alur kerja yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan sistem untuk meminimalkan human error sangat membantu memastikan akuntabilitas.

Digitalisasi menjadi pilar penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Teknologi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas laporan dan pengawasan.

Masyarakat memperoleh akses lebih besar terhadap informasi publik. Pemerintah daerah dapat bekerja lebih tertib dan profesional. Sistem digital menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Perubahan ini membawa dampak positif bagi pembangunan daerah secara jangka panjang.

C. Efisiensi Operasional Melalui Sistem Keuangan Daerah Berbasis Digital

Sistem keuangan daerah berbasis digital memberikan peningkatan besar terhadap efisiensi operasional pemerintah. Proses administrasi yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat dijalankan secara otomatis. Pemrosesan data menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih akurat. Setiap unit kerja dapat mengakses data yang sama tanpa perlu menunggu dokumen fisik. Hal ini mengurangi hambatan birokrasi yang sering memperlambat pelaksanaan program. Peningkatan efisiensi ini mempercepat berbagai aktivitas pengelolaan anggaran.

Selain mempercepat proses administrasi, digitalisasi juga mengurangi biaya operasional pemerintah daerah. Penggunaan kertas, fotokopi, dan penyimpanan fisik berkurang secara signifikan. Sistem digital memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk elektronik yang lebih hemat ruang dan aman. Selain itu, proses distribusi dokumen tidak lagi memerlukan waktu yang panjang. Efisiensi biaya ini menjadi keuntungan besar bagi pemerintah daerah. Dana yang dihemat dapat

dialihkan ke program prioritas lainnya (Sinulingga, E. N. 2025).

Aplikasi keuangan digital juga mempermudah proses pelacakan anggaran dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem menyediakan informasi lengkap yang diperlukan aparat untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Setiap tahap dapat dipantau tanpa hambatan administratif. Proses evaluasi dapat dilakukan lebih cepat karena seluruh data sudah tersedia secara otomatis. Hal ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih dinamis dan responsif. Efisiensi meningkat seiring penggunaan data yang lebih akurat.

Digitalisasi membantu mengurangi beban kerja aparatur pada tugas-tugas yang bersifat repetitif. Perhitungan anggaran, penyusunan laporan, dan dokumentasi dilakukan oleh sistem sehingga pegawai dapat fokus pada analisis. Kondisi ini meningkatkan produktivitas aparatur secara keseluruhan. Pegawai menjadi lebih efektif dalam menjalankan fungsi strategis dibandingkan pekerjaan manual. Efisiensi waktu yang dihasilkan memberikan ruang bagi pengembangan inovasi dalam tata kelola keuangan. Proses administrasi menjadi lebih bernilai.

Sistem digital juga mendukung kolaborasi antar-instansi secara lebih optimal. Setiap perangkat daerah dapat melihat dan memperbarui data yang sama tanpa hambatan. Koordinasi menjadi lebih cepat karena tidak lagi tergantung pada proses fisik. Hal ini memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyinkronkan kebijakan lintas sektor. Komunikasi yang

lebih cepat membantu memperlancar pelaksanaan setiap program. Efisiensi kolaboratif ini menjadi keunggulan besar penerapan digitalisasi.

Digitalisasi memberikan dampak besar pada peningkatan efisiensi operasional pemerintah daerah. Proses yang sebelumnya lambat kini dapat dijalankan lebih cepat dan akurat. Sistem digital mengurangi beban administratif dan biaya operasional secara signifikan. Aparatur dapat bekerja lebih fokus pada tugas strategis. Koordinasi antar-unit berjalan lebih efektif dan sinkron. Digitalisasi menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola keuangan modern yang efisien dan berdaya saing tinggi.

D. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah

Dalam proses penerapan digitalisasi, salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital. Tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap teknologi baru. Sebagian pegawai memerlukan pendampingan intensif agar dapat bekerja secara optimal. Kondisi ini membuat proses adaptasi membutuhkan waktu lebih panjang. Namun kebutuhan pelatihan menjadi sangat penting untuk memastikan sistem berjalan baik. Upaya peningkatan kompetensi menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi.

Selain kompetensi aparatur, tantangan lain terdapat pada keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Jaringan internet yang belum stabil sering

menghambat proses penginputan dan pengolahan data. Perangkat keras yang tidak memadai juga menurunkan kualitas implementasi sistem digital. Keterbatasan ini menyebabkan proses digitalisasi berjalan tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain. Pemerintah perlu melakukan investasi infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan program digitalisasi. Perbaikan infrastruktur ini menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Tantangan berikutnya muncul dari resistensi perubahan di lingkungan kerja. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital membuat sebagian pegawai merasa tidak nyaman. Kebiasaan lama sulit diubah dalam waktu singkat dan memerlukan pendekatan yang tepat. Pemerintah daerah harus memberikan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang digitalisasi. Dukungan pimpinan menjadi kunci dalam mengurangi resistensi tersebut. Lingkungan kerja perlu dibangun agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Integrasi data antar-instansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem digital. Setiap perangkat daerah memiliki pola pengelolaan data yang berbeda sehingga proses integrasi membutuhkan penyesuaian yang cukup besar. Standarisasi data menjadi langkah penting sebelum seluruh sistem dapat dihubungkan. Pemerintah daerah perlu membuat pedoman khusus yang mengatur format dan mekanisme integrasi. Tanpa standarisasi, proses digitalisasi berisiko mengalami hambatan teknis. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama keberhasilan.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan digitalisasi. Pelatihan berkelanjutan menjadi strategi pertama yang harus dilakukan secara sistematis. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan teknis melalui unit khusus teknologi informasi. Selain itu, regulasi perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan sistem digital. Investasi pada infrastruktur menjadi fondasi agar sistem dapat berjalan tanpa hambatan. Strategi ini membantu memastikan digitalisasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam implementasi digitalisasi dapat diatasi melalui sinergi antara aparatur, pimpinan, dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem kerja yang terbuka terhadap perubahan. Setiap hambatan teknis maupun non-teknis harus ditangani melalui langkah yang terstruktur. Strategi yang tepat membuat proses digitalisasi berjalan lebih lancar dan terarah. Upaya ini akan menghasilkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan profesional. Digitalisasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja pada era digital membawa dampak besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan modern. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan anggaran berlangsung lebih cepat dan akurat. Capaian program dapat dipantau melalui indikator yang terukur sehingga hasilnya lebih objektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena setiap transaksi tercatat secara jelas dalam sistem. Kondisi ini meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Transformasi menuju sistem berbasis teknologi menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat akuntabilitas publik.

Digitalisasi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kinerja. Pemanfaatan data real time menjadikan pengambilan keputusan lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan daerah. Koordinasi antar-unit kerja meningkat karena seluruh proses berlangsung dalam satu platform terpadu. Tantangan seperti keterbatasan kompetensi dan infrastruktur dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang konsisten. Dengan komitmen yang kuat, daerah mampu menciptakan tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, digitalisasi menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dunggio, R., Mahmud, S. I., & Sihira, S. S. (2025). Birokrasi Di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3871-3879.

- Hasyim, M. A., & Ilham, R. (2025). Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1321-1328.
- Kurniawan, R., Maulana, D. Y., Usman, H., Supyan, I. S., Agussalim, A., Maryadi, A. F., ... & Anita, D. (2025). *Keuangan Daerah 5.0: Adaptasi dan Inovasi di Era Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Lakat, J. (2025). Inovasi Kebijakan Fiskal: Menjawab Tantangan Manajemen Keuangan Publik di Sulawesi Utara pada Era Digitalisasi: Inovasi Kebijakan Fiskal: Menjawab Tantangan Manajemen Keuangan Publik di Sulawesi Utara pada Era Digitalisasi. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 218-226.
- Marpaung, I. S., & Patriansyah, W. (2025). Pengaruh Implementasi Model Transformasi Digital dan Smart Governance Terhadap Efisiensi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di Tapanuli Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1862-1872.
- Muslimin, M. I., Pratama, I. N., Ardiani, Y., Rahmania, S., Anjani, H., Imara, I. S., ... & Imran, I. (2025). Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 90-100.
- Nento, H. P. (2025). E-BUDGETING UNTUK SEMUA: IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 29-42.
- Rosmayani, R., Arham, A., Syukri, F., Fatimah, F., & Arodhiskara, Y. (2025). PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 5(1), 174-179.
- Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi manajemen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD): Penguatan ekosistem digital untuk akselerasi ekonomi daerah pada era digital. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(1), 17-28.
- Sunaini, W., & Satyadharma, M. (2025). Manajemen Talenta dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Suatu Kajian Literatur pada Sektor Publik Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 80-90.